

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Kabupaten Bantul atau yang lebih dikenal dengan nama *projetamansari* dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah, juga harus profesional dalam arti kata penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli dibidangnya masing-masing. Tolak ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerjanya dihadapkan dengan efisien penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan.

Saat ini Kabupaten Bantul juga mempunyai pusat pemerintahan, perdagangan, dan berkembangnya seni budaya khususnya tradisi Jawa. Dari segi obyek dan daya tarik wisata seperti: bangunan situs bersejarah, atraksi/event seni budaya tradisional, sekolah/pendidikan kesenian Jawa, makanan khas, pusat perbelanjaan, gudangnya budayawan/seniman, keramahtamahan masyarakatnya serta beberapa faktor lain telah menjadi “trademark” yang tidak dimiliki Kota/Kabupaten lain khususnya di Jawa Tengah telah menempatkan posisi sebagai salah satu Kota Tujuan Wisata yang memiliki prospek untuk dikembangkan.

Untuk mencapai hasil yang konsisten sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu disusun suatu strategi organisasi. Strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pokoknya adalah:

1. Pelestarian dan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW).
  - a. Menempatkan obyek wisata sejarah dan budaya unggulan sebagai obyek sentral dan pintu distribusi wisatawan ke obyek dan daya tarik wisata lain.

- b. Mengembangkan obyek wisata keunikan lokal wisata minat khusus berbasis budaya sebagai bagian dari obyek dan daya tarik wisata.

Contoh: Kampung Pengrajin

- c. Mengembangkan keterkaitan antar obyek dan daya tarik wisata melalui paket wisata budaya dan minat khusus.

Contoh: Kerjasama Dinas Pariwisata dengan Biro Perjalanan Wisata dalam pengadaan Paket Wisata Budaya.

- d. Mendorong tumbuh obyek-obyek wisata alternatif yang dapat dikembangkan guna lebih memperkaya tema dan memperluas serta pemeratakan manfaat pariwisata.

- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas atraksi/event seni budaya sebagai daya tarik wisata.

- f. Pengembangan sarana, prasarana, dan kegiatan lainnya yang bersumber dari prakarsa masyarakat sebagai pendukung obyek dan daya tarik wisata.

Contoh: dibangunnya area parkir yang luas di setiap tempat-tempat wisata

## 2. Optimalisasi Kinerja Sumberdaya Manusia Bidang Pariwisata.

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumberdaya Manusia pariwisata melalui jalur formal dan nonformal.

Contoh: melalui Diklat dan Penyuluhan.

- b. Peningkatan peran dan partisipasi Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dalam pembangunan pariwisata.

Contoh: kunjungan kerja ke luar daerah, ikut serta dalam festival kepariwisataan dan lain-lain.

- c. Pengembangan standarisasi sistem dan prosedur pelayanan perizinan.

Contoh: penetapan standar dan sistem pengajuan ijin usaha pariwisata.

- d. Peningkatan peran serta SDM sektor pariwisata dalam upaya mengoptimalkan event-event seni budaya.

3. Pengembangan Informasi dan Promosi Pariwisata.

- a. Penyusunan panduan informasi obyek dan daya tarik wisata agar diperoleh kesamaan informasi dan jaminan kualitas informasi yang diberikan.

Contoh: Pembuatan Katalog, Leaflet dan lain-lain.

- b. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal untuk peningkatan bagi promosi dan pemasaran pariwisata.

Contoh: Pembuatan Website Dinas Pariwisata atau mengenai informasi pariwisata Kabupaten Bantul.

4. Pengembangan Kerjasama/Kemitraan di bidang Pariwisata.

- a. Pengembangan keterpaduan pemasaran pariwisata antardaerah.

Contoh: memiliki manajemen pemasaran wisata yang terpadu se Solo Raya.

- b. Pembentukan networking antarwilayah dan antarpelaku pariwisata dalam pelestarian serta pengembangan obyek dan daya tarik wisata.

Contoh: kerjasama Biro Perjalanan Wisata seluruh wilayah D.I.Y dalam acara Travelmart

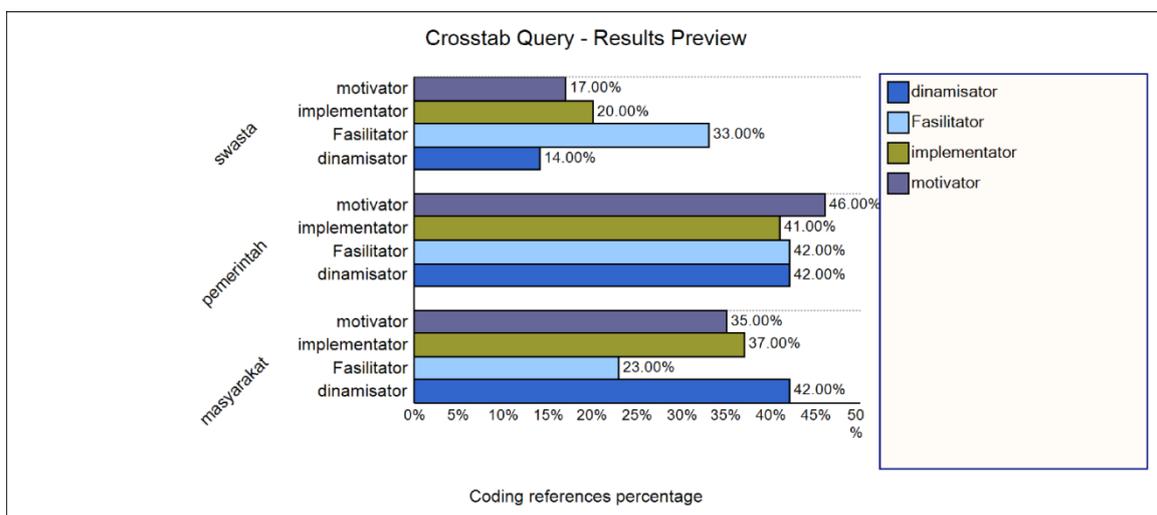
## **V.2. Strategi Optimalisasi Kinerja Sumberdaya Manusia Bidang Pariwisata.**

Strategi Pengembangan pariwisata membutuhkan kinerja yang baik dari Pemerintah. Kinerja yang baik dapat diukur melalui produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, serta tanggungjawab Dinas Pariwisata dalam pelayanannya kepada masyarakat. Kemudian harus didukung dengan peranan semua pihak sebagai motivator, implementator, fasilitator, dan

dinamisator. Kinerja yang baik juga sangat penting untuk pengelolaan/pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta pengembangan sumberdaya manusia bidang pariwisata. Hal-hal tersebut merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dalam mewujudkan visinya. Berikut analisis strategi optimalisasi SDM bidang pariwisata di Kabupaten Bantul :

Gambar 5.1

Grafik Analisis Strategi Optimalisasi SDM Bidang Pariwisata Kab. Bantul



Sumber : Analisis Melalui Aplikasi Nvivo12 dengan Fitur Crosstab Query Rate(%)

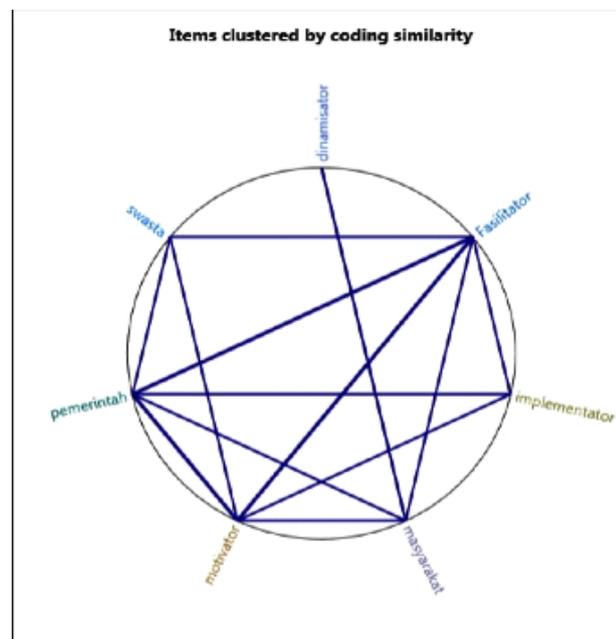
Dari data diatas menunjukkan bahwa dalam pengembangan atau optimalisasi SDM bidang pariwisata di Kabupaten Bantul, Pemerintah yang masih dominan dalam optimalisasi sumber daya manusia yaitu rata-rata persentase yang didapatkan sebesar 42%. hal tersebut disebabkan karena pemerintah intens dalam memberikan pelatihan tentang pariwisata kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata Bantul. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berperan sangat baik sebagai motivator, implementator, fasilitator, dan dinamisator dalam pengembangan SDM bidang pariwisata Bantul. Kemudian dipihak masyarakat dalam indikator dinamisator yang paling tinggi yaitu 42% hal ini disebabkan oleh antusiasme masyarakat yang sangat tinggi dalam berpartisipasi untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul, hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya

jumlah wisatawan yang berkunjung pada saat libur natal dan tahun baru (NATARU) serta adanya program pagelaran festival dari pemerintah yang didukung oleh masyarakat sehingga minat wisatawan meningkat 10% dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya dari pihak swasta mempunyai pesentase yang rendah dibanding semua pihak yang berperan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul. Pihak swasta bahkan hanya mendapatkan nilai 14% pada indikator Dinamisator, hal tersebut disebabkan pihak swasta kurang memperhatikan aturan dan arahan dari pemerintah pada saat pelatihan dan sosialisasi pariwisata, sehingga tak jarang ditemukan pihak swasta yang melanggar aturan serta banyaknya keluhan masyarakat tentang fasilitas pariwisata yang buruk dari pihak swasta. Sehingga dalam pengembangan SDM bidang pariwisata Kabupaten Bantul, pihak swasta harus lebih kooperatif dan ikut aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada saat pelatihan pengembangan sumber daya manusia.

Gambar 5.2

*Cluster Analisis* Optimalisasi Pengembangan SDM Kabupaten Bantul



Sumber : Analisis melalui nvivo12 dengan fitur *Cluster Analisis*

Dari data diatas menunjukkan bahwa dalam pengembangan atau optimalisasi SDM bidang pariwisata di Kabupate Bantul, Pemerintah yang masih dominan dalam optimalisasi sumber daya manusia Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berperan sangat baik sebagai motivator, implementator, fasilitator, dan dinamisator dalam pengembangan SDM bidang pariwisata Bantul. Kemudian dipihak masyarakat dalam indikator dinamisator paling dominan keterkaitannya. Kemudian masyarakat dalam pengembangan SDM tidak mempunyai hubungan terhadap implementator hal tersebut dikarenakan dalam setiap pelatihan masyarakat hanya sebagai peserta dan pelaku wisata. Selanjutnya dari pihak swasta mempunyai peran yang rendah dibanding semua pihak yang berperan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul. Data tersebut menunjukkan swasta hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam pengembangan SDM.

Strategi optimalisasi kinerja sumberdaya manusia bidang pariwisata jugadidukung dengan adanya kebijakan, baik secara internal maupun eksternal.

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, yaituPeningkatan Pengelolaan Kepegawaian. Kebijakan tersebut meliputi:
  - Meningkatkan kinerja organisasi dan aparatur.
  - Meningkatkan disiplin kerja, efisiensi waktu kerja dan efektivitaspencapaian target pekerjaan.
  - Meningkatkan koordinasi antar sub dinas, bagian, dan seksi.
  - Mendorong motivasi kerja karyawan, antara lain melalui penyusunan jobdescription, sandar kinerja, dan job enrichment, yang diimbangi denganpola pemberian reward and punishment secara proporsional.

- Memberikan ruang yang lebih besar untuk menampung persoalan-persoalanyang timbul guna menjamin kelancaran komunikasi dua arah.
  - Meningkatkan pelayanan kepegawaian
  - Meningkatkan kesejahteraan aparatur
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat, terdiri dari:
- a. Peningkatan Pembinaan Seni dan Budaya, meliputi:
- Meningkatkan bantuan dan pembinaan terhadap sanggar/paguyuban/kelompok/organisasi seni dan budaya
  - Meningkatkan event serta atraksi seni dan budaya
  - Meningkatkan penyelenggaraan pagelaran/pentas kesenian rakyat dan tradisional
  - Menggali potensi seni dan budaya yang ada dan berkembang dimasyarakat
  - Membantu pengembangan seni dan budaya masyarakat yang ada di kelurahan-kelurahan
- b. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataaan
- Meningkatkan pelayanan dalam bidang perizinan usaha jasa pariwisata
  - Meningkatkan pembinaan terhadap para pelaku pariwisata dan masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan
  - Meningkatkan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepariwisataan
  - Meningkatkan pembinaan dan pemantapan terhadap Pokdarwis yang ada di kelurahan-kelurahan

Sumberdaya manusia sektor pariwisata yaitu pegawai Dinas Pariwisata, Pokdarwis, organisasi kepariwisataan (misal: Asosiasi Perjalanan Wisata, PHRI atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, dll) serta masyarakat yang kegiatan hidupnya berkaitan dengan

sektor pariwisata.

Dalam rangka penerapan strategi optimalisasi kinerja sumberdaya manusia bidang pariwisata, Dinas pariwisata Kabupaten Bantul menetapkan beberapa program, yaitu:

1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Jalur Formal dan Nonformal.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui jalur formal adalah dengan mengadakan diklat dan penyuluhan. Diklat dan penyuluhan ini ditujukan bagi anggota Pokdarwis dan pegawai Dinas Pariwisata.

Tujuan dari diselenggarakannya diklat/penyuluhan ini adalah:

- Memelihara dan meningkatkan kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan tugas/pekerjaan, baik pekerjaan lama maupun pekerjaan baru, baik dari segi peralatan maupun metode
- Menyalurkan keinginan sumberdaya manusia sektor pariwisata untuk maju dari segi kemampuan dan memberikan rasa kebanggaan pada mereka.

Materi diklat/penyuluhan Teknik dan Strategi menjualkepariwisataan Kabupaten Bantul ini diberikan kepada para anggota diklat/penyuluhan untuk memperkaya dan melatih mereka agar mengerti teknik dan strategi seperti apa yang harus mereka lakukan untuk menjual obyek dan daya tarik wisata. Dengan demikian diharapkan para anggota diklat dapat menerapkan ilmu tersebut dalam perannya sehari-hari sehingga kinerja mereka pun akan lebih optimal.

Apaun Beberapa materi penyuluhan yang dapat di berikan antara lain:

- a. Sosialisasi materi Sadar Wisata

Pemerintah Kabupaten Bantul sangat menyadari bahwa Sadar Wisata belum terwujud di setiap sudut kota, hal ini menyebabkan situasi yang tidak nyaman bagi para wisatawan.

Sosialisasi Sadar Wisata yang dilakukan oleh Pemerintah ini diharapkan mampu menciptakan Kabupaten Bantul yang nyaman untuk dikunjungi para wisatawan, serta merupakan bukti upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia bidang pariwisata kepada masyarakat luas.

b. Upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban di obyek dan daya tarik wisata.

Penyuluhan ini terjalin berkat kerjasama antara Dinas Pariwisata beserta Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah. Maksud dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang sistem keamanan kepada pengusaha jasa industri pariwisata dan masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban di obyek dan daya tarik wisata. Sedangkan tujuannya adalah agar para pengusaha jasa industri pariwisata dan masyarakat di sekitar obyek pariwisata mengetahui tentang sistem keamanan dan ketertiban serta mampu berperan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di obyek dan daya tarik wisata.

Demikian juga bagi pegawai Dinas Pariwisata, pernah diadakan Diklat, yaitu Diklat Bahasa Inggris. Selain itu ada beberapa fakta yang telah dikemukakan, peneliti juga menemukan kekurangan dari pelaksanaan strategi optimalisasi kinerja sumber daya manusia bidang pariwisata ini, yaitu banyaknya pegawai yang kurang menguasai Teknologi Informasi (Komputer dan Internet), padahal bagaimanapun juga penguasaan Teknologi Informasi sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja seorang pegawai.

Sedangkan untuk peningkatan kuantitas sumber daya manusia bidang pariwisata yaitu melalui ajakan yang dilakukan secara langsung ketika para anggota Pokdarwis atau pegawai Dinas bersosialisasi dengan warga atau pedagang yang tinggal di sekitar Obyek dan Daya Tarik Wisata, hal tersebut juga sekaligus merupakan maksud dari pembinaan yang dilakukan melalui jalur nonformal. Tujuan dari peningkatan kuantitas sumber daya manusia bidang pariwisata adalah untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia bidang pariwisata

dikarenakan adanya jumlah potensi dan Obyek dan DayaTarik Wisata (ODTW) yang banyak diperlukan penanganan yang lebihintensif.

### **V.3. Langkah-langkah Untuk Mengembangkan Potensi Alam Sebagai Daya Tarik Pariwisata.**

Dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul sebagai daya tarikwisata Pemerintah Daerah setempat telah melakukan berbagai langkah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dan mengembangkan berbagai amenities (saranapenunjang) pariwisata yang dapat memberikan kenyamanan kepadawisatawan yang berkunjung ke berbagai obyek dan daya tarik wisatayang terdapat di daerah tersebut. Beberapa sarana yang disediakan dalam rangka meningkatkankepuasan kunjungan wisatawan, antara lain adalah :
  - 1) Warung Makan
  - 2) Pusat Cenderamata
  - 3) Look-out Point
  - 4) Joglo Pertunjukan Seni Tradisional
  - 5) Homestay
  - 6) Sarana olah raga
- b. Memperbaiki aksesibilitas menuju obyek dan daya tarik wisatayang terdapat di daerah Kabupaten Bantul.

Secara umum aksesibilitas menuju obyek dan daya tarik wisata pedesaan di Kabupaten Bantul dapat dikatakan cukup baik. Bahkan di daerah tujuan wisata pedesaan, seluruh jalan utama desa termasuk jalan-jalan kecil dan gang-gang kecil sudah merupakan jalan beraspal yang dibangun berdasarkan swadaya masyarakat dan dibantu oleh dana

pembangunan dari APBD Kabupaten Bantul. Aksesibilitas yang disediakan juga berupa tanda penunjuk arah menuju lokasi obyek dan daya tarik wisata di seluruh Kabupaten Bantul, meskipun sebagian masih bersifat sederhana. Dengan demikian sarana aksesibilitas yang berupa tanda penunjuk arah menuju obyek wisata perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

- c. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya yang berkaitan langsung dengan pengembangan wisata.

Dalam pembangunan pariwisata, sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kunci yang menentukan laju perkembangan pembangunan di suatu kawasan atau daerah. Oleh karena itu SDM yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul perlu dikelola secara tepat sesuai dengan karakteristiknya. Langkah yang telah dilakukan dalam mengelola SDM pariwisata di Kabupaten Bantul, antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang meliputi peningkatan kemampuan secara ilmu pengetahuan, peningkatan kemampuan fisik, keterampilan maupun dalam penguasaan sumber-sumber daya yang ada.
- 2) Mengembangkan kemampuan melalui upaya peningkatan produktivitas dengan cara perluasan kesempatan kerja serta peningkatan produksi melalui penggunaan berbagai macam teknologi yang telah berkembang sangat pesat, khususnya teknologi komunikasi dan informasi yang berkaitan erat dengan pembangunan pariwisata.
- 3) Mengembangkan jaringan pendidikan, baik formal maupun informal, yang menekankan pada profesionalisme sehingga kualitas calon tenaga kerja yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan kualitas yang mampu bersaing di era kompetisi yang tinggi pada saat ini.
- 4) Membangun incentive system yang jelas untuk memberikan motivasi kepada pegawai/pekerja agar memiliki semangat bekerja yang tinggi serta dorongan untuk

menunjukkan profesionalisme dibidangnya. Untuk menunjang pelaksanaan incentive system perludibangun sistem monitoring dan evaluasi dan meningkatkan competitiveness diantara staf untuk mencapai kualitas dan hasil yang baik.

#### 5) Meningkatkan promosi produk wisata pedesaan

Dalam rangka meningkatkan promosi pariwisata, khususnya wisata pedesaan, pihak pemerintah Kabupaten Bantul telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan koordinasi dengan stakeholder terkait. Dalam meningkatkan promosi perlu disusun program-program pemasaran pariwisata secara terpadu dan dirancang bersama antar seluruh elemen pemangku kepentingan.
- 2) Menciptakan destination image atau citra daerah tujuan wisata dalam hal ini kawasan pedesaan di Kabupaten Bantul sebagai daerah tujuan wisata pedesaan yang menawarkan pengalaman yang 'lain'.
- 3) Menciptakan sistem informasi pasar dan pemasaran sehingga dapat menyajikan database pariwisata yang cukup akurat dan dapat diperbarui sesuai perkembangan terkini.
- 4) Meningkatkan usaha promosi obyek dan daya tarik wisata yang ada. Tujuan dari kegiatan promosi ini adalah membentuk dan meningkatkan image/citra dari Kabupaten Bantul itu sendiri sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang potensial. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan (baik nusantara maupun mancanegara). Hal ini juga didasarkan pada kondisi aktual yang ada di mana sebagian besar wisatawan yang datang ke berbagai obyek wisata di Kabupaten Bantul mengetahui keberadaan obyek dan daya tarik wisata Kabupaten Bantul dari teman atau keluarga mereka.
- 5) Pengembangan materi informasi kepariwisataan. Usaha promosi produk wisata Kabupaten Bantul melalui penyebaran brosur/leaflet/booklet saat ini masih perlu

ditingkatkan. Sehingga penciptaan sarana lain juga diperlukan, seperti pembuatan CD interaktif ataupun website mengenai kepariwisataan di Kabupaten Bantul untuk mempromosikan berbagai produk dan atraksi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul.

- 6) Mengembangkan kelembagaan yang dapat mendukung pembangunan wisata pedesaan di Kabupaten Bantul

Upaya peningkatan kelembagaan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata pedesaan di Kabupaten Bantul antara lain adalah :

- 1) Pembinaan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dengan menanamkan prinsip-prinsip Sapta Pesona yang terdiri atas aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan.
- 2) Pembinaan kelompok swadaya masyarakat dan kelembagaan lainnya yang terkait dan mendukung pengembangan wisata pedesaan di Kabupaten Bantul. Sebagian dari kelompok-kelompok tersebut bergerak di berbagai bidang usaha jasa pariwisata termasuk jasa boga, jasa homestay, jasa cenderamata, jasa pemandu wisata dan lain sebagainya.

#### **V.4. Rencana Pengembangan SDM Pelaku Pariwisata**

Ada beberapa strategi untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pelaku Pariwisata antara lain bisa kita fokuskan pada :

- 1) Pelatihan Kepemanduan Secara Intensif

Tim pemandu wisata yang merupakan warga sekitar tempat pariwisata mendapat ilmu, pengalaman dan pelatihan secara langsung di lapangan oleh Pemerintah Daerah yang dipimpin langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Dalam meningkatkan kompetensi maka

perlu diadakan pelatihan untuk menambah skill dan kualitas setiap pemandu. Pelatihan tersebut bisa dilaksanakan low season pengunjung yang hadir atau waktu malam. Adapun bentuk pelatihan bagaimana membaca cuaca, hal tersebut bertujuan agar setiap pemandu lebih peka terhadap cuaca dan untuk meminimalisir resiko kecelakaan.

## 2) Pelatihan Bahasa Asing

Wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Kabupaten Bantul tidak hanya wisatawan domestik dan lokal. Banyak juga wisatawan manca negara terutama ketika musim panas di negara eropa. Pelatihan bahasa asing, terutama bahasa Inggris sangat penting bagi setiap pemandu. Karena pemandu akan menjalin komunikasi dengan para wisatawan yang datang ke obyek wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bantul. Maka pelatihan berbahasa asing lebih ditekankan pada kemampuan berbicara atau percakapan. Pelatihan tersebut harus dilakukan secara rutin dengan memberikan buku-buku penunjang bagi pemandu untuk berlatih.

## 3) Pengembangan Pengelolaan Homestay

Untuk menambah lama tinggal wisatawan yang datang, perlu adanya pembuatan ecolodge di beberapa rumah warga yang ingin menyediakan jasa penginapan bagi wisatawan. Mendirikan ecolodge menjadi alternatif untuk menambah pendapatan masyarakat lokal dan menambah lama tinggal wisatawan sehingga mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Maka pelatihan dibidang pengelolaan homestay/ecolodge, terutama bagaimana mengelolah, menciptakan penginapan yang layak untuk wisatawan. Tetapi pengelolaan penginapan tersebut disesuaikan dengan budaya setempat dan ramah lingkungan.

## 4) Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kabupaten Bantul terkenal akan keunikan kulinernya seperti, tiwul, gatot, krecek telo yang terbuat dari ketela pohon atau ubi kayu, dan nasi merah yang dapat dipesan dengan

menggunakan lauk sayur lombok hijau, daging sapi, iso babat, atau ikad wader sesuai dengan selera. Maka dengan melihat potensi kulinernya dan bahan untuk dijadikan ole-ole dan bisa juga masyarakat membuat souvenir. Tapi hasil pengamatan di obyek wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bantul tidak terdapat atau ditemukan ole-oleh dan souvenir khas masing-masing dari obyek wisata tersebut. Maka masyarakat lokal harus dilatih untuk menumbuhkan usaha masyarakat lokal. Maka peran pemerintah selaku stakeholder sangat penting dalam menyediakan tenaga untuk pelatihan kegiatan tersebut.

#### **V.5. Peran Fasilitator, Dinamisator, Motivator dan Implementor Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul**

Peran yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selain sebagai motivator adalah sebagai dinamisator, fasilitator, dan implementor. Peran-peran tersebut direalisasikan dengan berbagai program demi tercapainya pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism). Di era pembangunan saat ini masyarakat menjadi sorotan utama dalam segala aspek pembangunan termasuk bidang pariwisata. Maka terwujudnya pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism) merupakan harapan seluruh elemen baik itu pemerintah maupun masyarakat demi menciptakan kesejahteraan bersama.

Secara garis besar peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah melakukan tugas pemerintah dengan mengelola pariwisata yang ada di suatu daerah. Secara spesifik adalah memberdayakan masyarakat untuk bersama mengembangkan pariwisata yang ada di daerah. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh para ahli, maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mencakup pendorong bagi masyarakat lokal agar senantiasa mendukung perkembangan pariwisata di wilayahnya (motivator), penyediaan fasilitas pendukung pariwisata (fasilitator), kerjasama yang sinergis dengan berbagai stakeholder pariwisata (dinamisator).

Adapun peran dinas pariwisata sebagai motivator, sebagai dinamisator, fasilitator, dan implementor dapat di jabarkan dan rinci kedalam beberapa kategori antara lain yaitu :

a. Ketersediaan Anggaran

Pemerintah Kabupaten Bantul memerlukan dukungan finansial dalam menyelenggarakan perannya sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan lembaga, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Peran strategis anggaran daerah Kabupaten Bantul semakin menonjol karena dia merupakan alat untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran di masa mendatang, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, menetapkan otorisasi pengeluaran di masa mendatang, sebagai sarana pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kerja, alat motivasi pegawai, serta alat koordinasi bagi seluruh aktivitas berbagai unit kerja dalam birokrasi pemerintah. Maka prinsip pokok yang menekankan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah pada kepentingan publik menjadi isu penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul.

Suharyanto dalam (Kumorotomo, 2005:4) menyatakan beberapa alasan pentingnya anggaran, antara lain:

- 1) Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Anggaran diperlukan karena adanya tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang sedangkan ketersediaan sumber daya sangat terbatas,

anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya, pilihan dan trade off.

- 3) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas.

Berkaitan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, ketersediaan anggaran sangat penting, karena anggaran merupakan sector yang krusial bagi pemerintah. Oleh karena itu dalam pengelolaan anggaran penting menerapkan beberapa prinsip terkait dengan good governance , antara lain:

- a) Transparansi

Transparansi dalam istilah politik merupakan keterbukaan. Yang dimaksud keterbukaan dalam hal ini adalah keterbukaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah Kabupaten Bantul kepada masyarakat dan khalayak umum. Maksud dari transparansi adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap masyarakat.

- b) Akuntabilitas

Dalam istilah yang ada akuntabilitas sering diartikan yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility, yang dapat dipertanyakan (answerability). Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan. Secara teknis adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan dan melaporkan sesuatu yang sudah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawaban.

- c) Value For money Implementasi anggaran yang menerapkan prinsip dapat memberikan manfaat; efektivitas pelayanan publik yang tepat sasaran,

meningkatkan mutu pelayanan publik, penghematan biaya pelayanan karena berkurangnya inefisiensi dan penghematan sumber daya, alokasi pembiayaan berorientasi pada kepentingan publik dan meningkatkan kesadaran penghargaan terhadap publik. Anggaran diperuntukkan untuk tersediannya sarana, prasarana dan operasional implementor, untuk mewujudkan realisasi dari kebijakan. Pelaksanaan anggaran keuangan (financial) akan ditentukan oleh kualitas implementor dalam pengelolaannya. Dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan ketersediaan anggaran adalah tersediannya alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism).

b. Ketersediaan sarana dan prasarana

Kesuksesan dan kelangsungan hidup organisasi dalam menyiasati pengaruh lingkungan sangat tergantung pada kapasitas dalam merencanakan, menggali, menggerakkan, dan mengelola sumber daya manusia maupun mengelola sarana dan prasarana yang dimiliki. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan modal pemerintah untuk merealisasikan suatu program. Sarana dan prasarana yang memadai lebih memudahkan pemerintah untuk mengimplementasikan program yang sudah direncanakan.

Selain itu sarana dan prasarana juga bisa menjadi optimal atau tidaknya pemerintah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bantul harus menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang telah ada, bahkan memperbaharui apabila sarana dan prasarana tersebut sudah tidak layak untuk digunakan. Ketersediaan sarana dan prasarana adalah kepemilikan aset yang menunjang kegiatan untuk mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism).

c. Kemitraan (Partnership)

Prinsip good governance yang telah disebutkan sebelumnya merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta merupakan suatu langkah yang biasa dilakukan dalam rangka menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Kemitraan (partnership) membangun hubungan penting antara semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan kemitraan atau partnership dalam hal ini adalah kerjasama yang telah atau sedang dilakukan dengan pihak lain yang berguna untuk memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan (operasional) terbentuknya pariwisata berbasis masyarakat community based tourism.

d. Peran serta masyarakat (Participation)

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation” yang berarti pengambilan keputusan dan pengikutsertaan (John M. Echols Hasan Shadily 1995: 419). Peran serta masyarakat Kabupaten Bantul merupakan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk andil dalam setiap kegiatan pemerintah yang mengundang keikutsertaan masyarakat sebagai warga negara. Dalam rangka mengoptimalkan peran dari pemerintah, maka peran serta masyarakat Kabupaten Bantul perlu menjadi sorotan utama, karena masyarakat merupakan subjek dan objek dari kebijakan.

## V.6. Faktor pendukung dan faktor penghambat

### 1) Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan strategi optimalisasi sumberdaya manusia pelaku pariwisata ini adalah:

- a. Partisipasi masyarakat sekitar obyek dan daya tarik dan sumberdaya manusia sektor pariwisata cukup tinggi, dengan partisipasi mereka dalam kegiatan bisnis pariwisata maupun kesadarannya dalam turut serta menjaga kelestarian aset wisata yang ada.
- b. Adanya dukungan dari Instansi terkait. Misalnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selaku dinas yang diberi wewenang oleh Bupati Bantul untuk mengembangkan pariwisata Kabupaten Bantul melakukan kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengadakan Diklat Cenderamata bagi para pedagang cenderamata.
- c. Adanya RIPARDA Otonomi Daerah yang secara langsung berimbas terhadap kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengembangkan dan membangun segenap potensi yang sekiranya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk juga dalam pengembangan dan pembangunan potensi pariwisata.

### 2) Faktor Penghambat

Selain faktor-faktor pendukung yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam pelaksanaan strategi optimalisasi sumberdaya manusia pelaku pariwisata juga mengalami hambatan, berikut adalah faktor-faktor penghambat yang dimaksudkan:

- a. Dana yang diperoleh Dinas Pariwisata untuk melakukan promosi pariwisata masih sangat kurang. Dinas Pariwisata dananya masih jauh dari harapan, masih sangat kurang, sehingga jadi promosi yang dilakukan masih sangat terbatas, paling-paling bikin brosur, leaflet gitu. Jadi belum bisa maksimal. Di Bali yang sudah maju seperti

itu saja danaya besar jadi bisa bikin promosi yang maksimal, Kabupaten bantul yang belum maju dananya cuma sedikit.

- b. Belum adanya kesamaan persepsi Kabupaten Bantul sebagai Kota Tujuan Wisata Pelestarian Promosi dan Kerjasama Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menuju tren Kota Internasional.
- c. Pemanfaatan jaringan informasi dan promosi pariwisata belum optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana yang ada, sehingga promosi yang dilakukan hanya terbatas.
- d. Jaringan kemitraan pariwisata seluruh wilayah D.I.Y dan sekitarnya belum optimal. Keadaan tersebut dikarenakan hanya sebagian kawasan lebih fokus pada kegiatan pengembangan pariwisata pada masing-masing daerahnya sehingga belum terlalu optimal.
- e. Kurang intensifnya pembinaan kelompok sadar wisata di Kabupaten Bantul.
- f. Rendahnya kunjungan wisatawan yang menyebabkan kurangnya motivasi masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul.
- g. Relatif rendahnya kepedulian pemerintah daerah dalam pengembangan SDM/aparatur negara yang dapat merumuskan konsep-konsep pengembangan pariwisata yang sesuai dengan karakteristik potensi, baik potensi alam maupun budaya, yang dimiliki oleh kabupaten Bantul.
- h. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- i. Pemahaman pemerintah dan masyarakat mengenai potensi pariwisata masih rendah.
- j. Pemahaman pelaku wisata dari dunia industri atau bisnis mengenai potensi pariwisata juga masih rendah.
- k. Kepedulian pemerintah untuk mengembangkan obyek wisata masih rendah.

- l. Adanya pemahaman bahwa selama ini pariwisata belum memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah (pemerintah kabupaten).
- m. Rendahnya kepedulian pemerintah terhadap upaya meningkatkan pengalaman wisatawan sehingga mereka tertarik untuk mengunjungi obyek yang pernah dikunjunginya atau bersedia memberikan rekomendasi dan kesan positif kepada teman-temandan sanak keluarga mereka.